



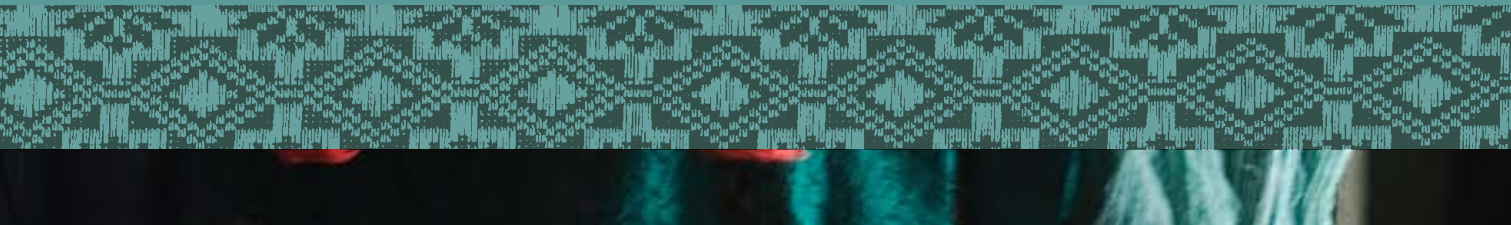
Australia Indonesia Partnership
Kemitraan Australia Indonesia



www.ausaid.gov.au



Kemitraan Australia Indonesia: Tahun peninjauan 2007





Australia Indonesia Partnership
Kemitraan Australia Indonesia



Kemitraan Australia Indonesia: Tahun peninjauan 2007

© Commonwealth of Australia (2008). Hak cipta dilindungi undang-undang. Selain untuk penggunaan sebagaimana yang diijinkan berdasarkan *Undang-undang Hak Cipta 1968*, dilarang memperbanyak dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari Commonwealth. Permohonan dan pertanyaan yang berkaitan dengan memperbanyak dan hak harus dialamatkan ke Commonwealth Copyright Administration, Attorney-General's Department, Robert Garran Offices, National Circuit, Barton ACT 2600, atau diposkan ke www.ag.gov.au/cca

ISBN 978-1-921285-61-5

Disiarkan oleh Lembaga Australia untuk Pembangunan Internasional, Canberra, Nopember 2008.

Dokumen ini tersedia di:
www.ausaid.gov.au/publications

Untuk information lebih lanjut tentang program bantuan luar negeri Australia, silahkan hubungi AusAID Public Affairs Group

AusAID
GPO Box 887
Canberra ACT 2601
Phone +61 2 6206 4000
Facsimile +61 2 6206 4880
Internet www.ausaid.gov.au

Dirancang oleh GRiD Canberra
Dicetak oleh Bluestar

Sampul: Dana hibah AusAID telah membantu para pemilik usaha kecil, termasuk penunun, untuk kembali pulih dari dampak gempa bumi Yogyakarta tahun 2006. Foto: Lorrie Graham

Catatan: *Kemitraan Australia Indonesia: Tahun Tinjauan 2007* merupakan update dari *Indonesia Update Tahun Tinjauan 2006*.

Semua angka dolar adalah dalam dolar Australia, kecuali jika dinyatakan yang lain.

Daftar Isi

Pendahuluan: tinjauan tahun 2007	1
Kemitraan Australia Indonesia untuk Rekonstruksi dan Pembangunan	3
Rangkuman keuangan	4
Kemajuan untuk mencapai Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs)	5
Pertumbuhan yang berkelanjutan dan manajemen ekonomi	6
Garis besar	6
Infrastruktur	6
Pembangunan daerah	10
Meningkatkan manajemen	12
Pertumbuhan ekonomi dengan pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan	12
Investasi untuk pembangunan manusia	13
Garis besar	13
Pendidikan	14
Kesehatan	16
Demokrasi, keadilan dan pemerintahan yang baik	20
Garis besar	20
Keamanan dan perdamaian	24
Garis besar	24
Siap bencana menyelamatkan jiwa	24



Australia bekerja bersama Indonesia di sektor pedesaan untuk memperbaiki ketahanan pangan dan mengurangi kemiskinan, termasuk di propinsi Nusa Tenggara Timur.
Foto: Adi Rahmatullah

Pendahuluan: Tahun peninjauan 2007

2007 kembali menjadi tahun yang signifikan bagi Kemitraan Australia Indonesia.

Rekonstruksi yang dilakukan setelah terjadinya bencana tsunami hampir selesai, dengan membantu menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi masyarakat di Aceh dan Nias. Ini merupakan pekerjaan inti dari Kemitraan Australia Indonesia untuk Rekonstruksidan Pembangunan (AIPRD) senilai \$1 miliar, paket bantuan terbesar tunggal dalam sejarah Australia.

AIPRD juga mencakup program pengembangan ekonomi dan sosial berskala besar di seluruh Indonesia dan, pada 2007, banyak dari program-program ini dimulai dan yang lainnya bergerak maju menunjukkan hasil-hasil yang positif.

Untuk meningkatkan pencapaian-pencapaian ini, pemerintah Australia dan Indonesia berkolaborasi dalam pengembangan *Strategi Kerjasama Pembangunan Australia Indonesia 2008–2013* yang baru. Strategi tersebut akan memandu kedua negara tersebut bekerja bersama-sama selama lima tahun ke depan untuk membantu Indonesia dalam mencapai tujuan-tujuan pembangunan, termasuk Tujuan-tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) yang telah disepakati secara internasional.

Kemitraan Australia-Indonesia: Tahun Tinjauan 2007 melaporkan kemajuan-kemajuan yang telah dicapai dan hasil-hasil yang telah diraih selama tahun tersebut di beberapa daerah kunci: pertumbuhan yang berkelanjutan dan manajemen ekonomi; investasi untuk pembangunan manusia; demokrasi, keadilan dan pemerintahan yang baik; serta keamanan dan perdamaian.

Laporan ini menunjukkan bahwa bantuan pembangunan Australia berhasil menolong mereka yang paling membutuhkan dan membuat perbedaan.

Ratusan sekolah lanjutan pertama dibangun atau diperluas pada 2007, sehingga kini ribuan anak dari keluarga miskin dan daerah terpencil dapat masuk sekolah. Pembangunan juga dilakukan untuk 500 sekolah lainnya. Program pendidikan dasar memainkan peranan yang sangat penting bagi pemerintah Indonesia untuk mencapai target wajib belajar sembilan tahun bagi semua anak.

Program pembangunan desa senilai \$38 juta mengidentifikasi prospek-prospek pasar yang menjanjikan bagi produk-produk pertanian seperti kopi dan kacang yang akan mendorong produktifitas dan hasil-hasil pertanian di Indonesia bagian Timur.

Lebih dari empat juta orang di desa-desa memiliki akses untuk mendapatkan air bersih dan sanitasi berkat proyek yang didanai bersama oleh AusAID dan Bank Dunia, dan Indonesia memiliki kemampuan yang lebih baik untuk merespon wabah flu burung, dengan mengurangi resiko penyebaran penyakit tersebut melalui unggas dan manusia.

Pemilihan daerah yang dilaksanakan di seluruh Indonesia pada 2007 berlangsung secara lebih transparan dan menarik lebih banyak pemilih, sebagian berkat AusAID yang

mendanai pendidikan bagi para pemilih dan pengawasan pemilihan. Australia membantu Mahkamah Agung Indonesia untuk menjalankan reformasi hukum yang memberikan akses lebih baik untuk mendapatkan keadilan kepada masyarakat miskin dan terpinggirkan, termasuk perempuan.

Australia juga mengumumkan inisiatif baru, termasuk bantuan sebesar \$30 juta, untuk membantu Indonesia mengurangi emisi gas rumah kaca sebagai akibat dari pembalakan hutan di Kalimantan. Kemitraan baru Australia dan Indonesia untuk HIV senilai \$100 juta akan mencegah dan membatasi penyebaran epidemi tersebut, meningkatkan kualitas orang yang hidup dengan virus HIV, dan mengentaskan dampak-dampak sosial-ekonominya.

Meskipun telah ada kemajuan di banyak bidang, tantangan tetap masih ada. Meskipun pertumbuhan ekonomi sekarang membuat Indonesia digolongkan sebagai negara berkembang berpendapatan menengah, sekitar 100 juta orang—atau hampir setengah dari populasi—masih hidup dengan pendapatan kurang dari US\$2 per hari. Ketika loncatan besar dilakukan dalam membangun infrastruktur yang baru, banyak masyarakat miskin yang terus hidup dengan akses terbatas atau tanpa akses untuk mendapatkan pelayanan-pelayanan mendasar seperti air bersih.

Australia telah menaikkan tiga kali lipat bantuannya sejak 2003-2004 dan sekarang merupakan donor pemberi bantuan bilateral terbesar bagi Indonesia. Metode penyerahan bantuan telah berubah—pendekatan-pendekatan proyek tradisional telah digantikan dengan pendekatan-pendekatan yang membantu Indonesia untuk menggunakan sistem dan sumberdayanya sendiri secara lebih efektif dan efisien, dengan semangat kemitraan yang kuat. Hal ini akan terus berlangsung ketika Kemitraan Australia Indonesia bekerja pada tingkat pemerintahan nasional, propinsi dan kabupaten dan dengan donor-donor, masyarakat madani, serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lainnya untuk mendapatkan pemecahan masalah yang praktis dan berkelanjutan dalam rangka mengurangi kemiskinan dan membangun kesejahteraan.

Kemitraan Australia Indonesia untuk Rekonstruksi dan Pembangunan

Program AIPRD senilai \$1 juta adalah paket bantuan tunggal terbesar dalam sejarah Australia. Paket tersebut diumumkan setelah bencana tsunami yang terjadi pada 26 Desember 2004, ketika Australia bergerak cepat untuk menolong daerah-daerah yang terkena bencana, terutama Aceh dan Nias, untuk memulihkan daerah-daerah tersebut dari kehancuran yang telah menelan banyak korban dan kehancuran ekonomi yang luar biasa.

Namun demikian, AIPRD sekedar upaya rekonstruksi, dengan adanya berbagai program yang mendorong pembangunan sosial dan ekonomi di wilayah-wilayah terdampak dan juga di bagian-bagian lain di Indonesia. Ini merupakan tanda perubahan dalam pemberian bantuan, dimana Pemerintah Australia mendukung program-program yang diidentifikasi oleh Pemerintah Indonesia sebagai prioritas dalam pengentasan kemiskinan. Dengan resiko berbagai bencana alam yang kapan saja bisa terjadi, AIPRD juga membantu pemerintah, masyarakat dan masyarakat madani untuk selalu siap dan tanggap menghadapi berbagai keadaan darurat.

Pada 2007, kemajuan yang signifikan dicapai dengan membangun kembali infrastruktur masyarakat yang sangat penting di Aceh dan Nias, seperti balai desa dan sekolah, dan rekonstruksi diharapkan tuntas pada 2008. Bantuan Australia terus diberikan untuk membantu memulihkan sistem kesehatan, pendidikan, dan tata pemerintahan serta untuk membangun kembali kemampuan masyarakat dalam bekerja setelah begitu banyak orang yang tewas dalam bencana tersebut.

AIPRD juga mendanai rekonstruksi dan mendukung mata pencaharian di Yogyakarta dan Jawa Tengah setelah gempa bumi pada bulan Mei 2006, dan memberikan bantuan pada daerah-daerah bencana lainnya.

Laporan ini juga menyertakan rincian mengenai hasil-hasil yang telah dicapai oleh AIPRD pada 2007.

Pemerintah Australia dan Indonesia terlibat pada tingkat politik tertinggi dalam AIPRD. Program tersebut dikelola oleh Komisi Gabungan yang diawasi oleh Perdana Menteri Australia dan Presiden Indonesia dan dana-dana bantuan dialokasikan berdasarkan kerangka kemitraan yang disetujui oleh kedua pemerintahan tersebut.

Rangkuman Keuangan

Pada 2007, total pengeluaran untuk Kemitraan Australia Indonesia adalah \$292,1 juta, termasuk \$161,7 juta untuk AIPRD.

AIPRD lima tahun tersebut terdiri dari \$500 juta dana hibah dan \$500 juta dalam bentuk pinjaman yang sangat lunak untuk proyek-proyek utama rekonstruksi dan pembangunan. Pada akhir 2007, semua dana telah diserahkan dan sekitar \$380 juta telah dihabiskan.

Kesepakatan dana pinjaman sebesar \$300 juta untuk Proyek Perbaikan Jalan di Indonesia Bagian Timur (EINRIP) saat ini diperkirakan akan cair dalam periode yang lebih lama menyusul adanya perjanjian antara Australia dan Indonesia untuk memastikan bahwa proses pembuatan rancangan, pembangunan, pengadaan barang, pengawasan dan pertanggungjawaban dilakukan dengan baik. Kesepakatan dana pinjaman EINRIP ditandatangani pada 7 September 2007. Pekerjaan sipil akan mulai pada pertengahan kedua 2008 dan pencairan dana terakhir diharapkan pada 2010-11.

Total Pengeluaran AIPRD hingga akhir Desember 2007

	Komitmen* \$ juta	Pengeluaran 2007 \$ juta	Total pengeluaran hingga akhir Desember 2007 \$ juta
Bantuan AIPRD			
Perbaikan jalan nasional	28	5,5	10,1
Pendidikan dasar	100	11,7	25,1
Beasiswa pasca sarjana	78	21,6	39,5
Rehabilitas dan rekonstruksi Aceh dan Nias	181	44,5	153,6
Kemitraan pemerintah dalam reformasi sektor ekonomi dan sektor publik	50	8,2	17,8
Pembangunan desa dan pertanian (termasuk rekonstruksi Yogyakarta)	68	17,5	33,6
Kesiapan dan tanggap bencana	15	4,4	9,4
Jumlah Hibah	520	113,4	289,1
Pinjaman AIPRD			
Perbaikan jalan nasional	300	0,0	8,2
Pendidikan dasar	200	48,3	78,3
Jumlah Pinjaman	500	48,3	86,5
Jumlah Semuanya	1020	161,7	375,6

*Overprogramming dikeluarkan berdasarkan Program Kerja sama Pembangunan Indonesia.

Kemajuan untuk mencapai Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs)

Kemitraan Australia Indonesia merupakan bantuan pembangunan untuk mendukung Indonesia mencapai MDGs. *Laporan Tujuan Pembangunan Milenium Nasional 2007* Indonesia yang diluncurkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada bulan Desember 2007 melaporkan bahwa:

1. Indonesia besar kemungkinan akan mencapai tujuan-tujuan dalam bidang:

- > pengentasan kemiskinan
- > tingkat pendaftaran siswa pendidikan dasar
- > tingkat melek huruf
- > penghapusan perbedaan jender dalam pendidikan dasar
- > menghentikan penyebaran penyakit TBC
- > meningkatkan kualitas sanitasi.

2. Indonesia menunjukkan kemajuan dalam tujuan-tujuan di bidang-bidang berikut ini dan besar kemungkinan tercapai apabila ada upaya yang berkelanjutan:

- > mengurangi tingkat kematian anak
- > mengurangi berkembangnya penyakit malaria
- > meningkatkan tingkat kelulusan siswa sekolah dasar
- > meningkatkan akses untuk air bersih.

3. Indonesia besar kemungkinan tidak dapat mencapai tujuan-tujuan di bawah ini kecuali ada investasi lebih jauh yang signifikan:

- > kematian ibu
- > gizi anak
- > prevalensi HIV
- > keberkelanjutan lingkungan pada tingkat nasional.

Pertumbuhan yang berkelanjutan dan manajemen ekonomi

Garis besar

Pada 2007, Kemitraan Australia Indonesia mengalami kemajuan dalam perencanaan, pembangunan dan peningkatan infrastruktur, yang difokuskan pada jalan, air bersih dan sanitasi. Upaya-upaya ini menunjukkan betapa pentingnya infrastruktur bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial yang berkelanjutan. Jalan yang lebih baik, misalnya, meningkatkan akses ke pasar, tempat kerja dan berbagai pelayanan sosial yang sangat penting—yang tanpa semua itu, daerah-daerah yang terpencil dan miskin di Indonesia akan tetap terisolasi dan tertinggal.

Kemitraan tersebut membantu masyarakat meningkatkan penghasilan keluarga mereka, termasuk melalui pertanian dan pembangunan pasar. Di Aceh dan Nias, dan di Yogyakarta dan Jawa Tengah, mata pencaharian dan infrastruktur masyarakat yang luluhlantak oleh bencana alam dibangun kembali.

Penekanan pada pengelolaan pertumbuhan dan ekonomi yang berkelanjutan ini dijalankan dengan komitmen yang lebih tinggi dari Indonesia dan Australia untuk melindungi lingkungan dan mengurangi gas-gas efek rumah kaca.

Infrastruktur

Jalan menuju pertumbuhan ekonomi

Australia mendukung pembangunan daerah dan sosial di Indonesia bagian timur dengan memperbaiki jaringan jalan nasional dan jembatan-jembatan. Pada bulan September 2007, Australia menandatangani sebuah kesepakatan pinjaman senilai \$300 juta dengan Pemerintah Indonesia sebagai bagian dari proyek senilai \$328 yang didanai berdasarkan AIPRD.

Ratusan kilometer jalan nasional dan jembatan akan diperbaiki di 10 propinsi di seluruh Indonesia. Hal ini akan memberikan keuntungan ekonomi yang nyata dan mengurangi waktu serta biaya perjalanan. Perencanaan dan rancangan yang memenuhi standar internasional dimulai, dengan memberikan kontribusi pada peningkatan kualitas dalam sistem teknik pembuatan rancangan dan pengadaan barang Pemerintah Indonesia.

Tender pembangunan akan dilakukan dari pertengahan 2008 dan pekerjaan jalan pertama akan berlangsung di sepanjang garis pantai Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara, Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan, Bali dan Nusa Tenggara Timur. Jembatan di Sulawesi Utara yang tersapu banjir pada awal 2006 juga akan diperbaiki.

Mengurangi hambatan-hambatan investasi infrastruktur dan meningkatkan produktifitas

Sebuah inisiatif senilai \$64,8 juta untuk infrastruktur Indonesia, yang dikenal sebagai IndII diumumkan pada 2007 untuk membantu Pemerintah Indonesia menarik investasi melalui reformasi kebijakan dan peraturan infrastrukturnya. Inisiatif tersebut juga akan mendukung pemerintahan propinsi dan kabupaten untuk merencanakan dan melaksanakan proyek-proyek infrastruktur.

IndII meningkatkan reputasi AusAID karena tanggap dalam menyediakan bantuan teknis dan proyek-proyek infrastruktur model yang berkualitas.



Diatas: Memperbaiki akses air bersih dapat membantu memperbaiki kualitas hidup, kesehatan dan produktifitas desa-desa miskin dan terpencil. Foto: Adi Rahmatullah

Kiri: Ratusan kilometer jalan dan jembatan umum akan diperbaiki di 10 propinsi di wilayah timur Indonesia. Foto: AusAID

Akses untuk mendapatkan air bersih dan sanitasi

Australia mendukung upaya-upaya Indonesia untuk memperbaiki kualitas pasokan air dan sanitasi untuk masyarakat miskin, dengan mengalokasikan dana senilai \$20 juta dalam prakarsa-prakarsa dengan Bank Dunia dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) Indonesia.

Satu inisiatif untuk meningkatkan kesehatan, produktifitas dan kualitas hidup di 2500 desa tertinggal di tujuh propinsi. Pada 2007, keluarga-keluarga yang memiliki akses untuk mendapatkan air bersih naik dari 25 persen menjadi 77 persen, sehingga sekitar 4,2 juta jiwa dapat menikmati manfaatnya. Tiga ratus enam puluh desa telah memiliki sanitasi dan sekitar 120 desa kini sudah sepenuhnya atau hampir bebas dari kebutuhan masyarakat untuk membuang kotoran di tempat umum.

Keberhasilan ini diakui oleh donor-donor lainnya seperti UNICEF dan Bank Pembangunan Asia, yang telah mengadopsi prinsip-prinsip yang sama mengenai penyediaan air dan sanitasi lingkungan yang berbasis masyarakat.

Rencana air dan sanitasi diselesaikan di lebih dari setengah kabupaten yang terlibat dalam proyek tersebut, meskipun mengintegrasikan kebijakan-kebijakan nasional tentang air dan

sanitasi dengan anggaran pemerintah daerah masih menjadi tantangan. Inisiatif lainnya adalah membantu Pemerintah Indonesia untuk menjalankan kebijakan nasional dan terus melakukan reformasi di sektor tersebut.

Rekonstruksi hampir selesai di Aceh

Tiga tahun setelah tsunami, upaya-upaya rekonstruksi yang didanai oleh AIPRD hampir selesai.

Fasilitas-fasilitas di Universitas di Aceh, termasuk Universitas Syiah Kuala dan Institute Pelatihan Penelitian Aceh diselesaikan pada 2007, setelah selesai membangun kembali unit gawat darurat di rumah sakit utama dan akademi kebidanan dan keperawatan pada 2006.

Pekerjaan untuk memulihkan berbagai fasilitas di Pelabuhan Ulee Lheue di Banda Aceh telah mengalami kemajuan, dan rekonstruksi terminal feri permanen diharapkan akan selesai pada pertengahan 2008. Perbaikan awal yang sebelumnya telah dilakukan membuat ribuan penumpang dapat menggunakan layanan feri, sehingga daerah-daerah terpencil bisa dijangkau.

Australia telah membantu memulihkan kehidupan masyarakat setelah lebih dari 500.000 orang kehilangan tempat tinggal dan lebih dari 800 desa hancur. Lebih dari 175 balai desa telah dibangun, sehingga menyediakan tempat pertemuan yang sangat dibutuhkan untuk membahas kegiatan masyarakat dan perencanaan desa. Lebih dari 200 fasilitator dikerahkan untuk membantu masyarakat mengelola rekonstruksi mereka.

Di Nias, pekerjaan difokuskan pada perbaikan jalan dan jembatan serta menyediakan pasokan air yang dapat dijangkau, sehingga meningkatkan kesehatan masyarakat serta mengurangi jumlah waktu yang diperlukan bagi perempuan dan anak-anak untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka.

Program tata pemerintahan dan infrastruktur masyarakat yang didanai Australia, LOGICA, memulihkan kembali kepemilikan lahan dengan memetakan batas-batas lahan yang telah sebelumnya tersapu. Pemetaan ini melibatkan penduduk desa yang bersepakat mengenai batas-batas daerah, penggunaan dan kepemilikan lahan. Pada 2007, sebanyak 61 desa dan hampir 20.000 kavling lahan dipetakan—proses tersebut telah diadaptasi di 400 desa dan merupakan syarat penting untuk membangun lebih dari 100.000 rumah.

Bantuan-bantuan kecil yang sangat dibutuhkan untuk infrastruktur desa membantu lebih dari 200 desa untuk membangun jalan-jalan, saluran air, jembatan, balai desa, sumur dan saringan air, serta berbagai pusat kegiatan perempuan.

Bantuan Australia telah diakui di seluruh Aceh dan oleh internasional karena fleksibel dan tanggap terhadap kebutuhan nyata masyarakat dan karena menempatkan masyarakat Aceh sebagai penentu rekonstruksi. Australia juga dihargai karena mampu bekerja bahu membahu dengan masyarakat Indonesia dan memastikan bahwa rekonstruksi tersebut berkualitas.

Membangun kembali infrastruktur dan mata pencaharian di Yogyakarta

Rekonstruksi tersebut berlangsung di Yogyakarta dan Jawa Tengah, menyusul gempa yang terjadi pada bulan Mei 2006. AusAID menyediakan dana dari AIPRD hingga \$30 juta dalam tiga tahun untuk membantu korban bencana membangun kembali mata pencaharian dan infrastruktur mereka, termasuk sekolah-sekolah. Pada 2007, keterlibatan masyarakat dalam proses pemulihan ini memberikan sumbangan pada keberhasilan mereka. Para wanita juga memainkan peranan yang sangat penting.

Program Bantuan Masyarakat Yogyakarta-Jawa Tengah menyediakan air bersih dan sanitasi bagi masyarakat setempat, serta bahan-bahan untuk membangun toilet dan septik tank-nya sendiri. Sembilan klinik kesehatan yang hancur di Klaten dan Bantul dibangun kembali. Para pengembang, arsitektur, dan kelompok masyarakat lokal menerima pelatihan kerja agar klinik-klinik ini aman dari gempa bumi.

Program Bantuan Aktif Masyarakat yang diberikan melalui *Community Housing Foundation (CHF) International dan International Organization for Migration* memberikan pelatihan praktis kepada lebih dari 1200 warga desa untuk membangun kembali rumah-rumah tahan gempa bagi keluarga-keluarga yang rentan.

AusAID juga menyediakan bantuan mata pencaharian hingga \$1,5 juta kepada LSM lokal dan internasional. Bantuan-bantuan tersebut digunakan untuk mengembangkan ide-ide untuk membantu korban gempa bumi untuk membangun kembali atau memulai kembali usaha-usaha mereka. Hal ini termasuk inisiatif 'cepat tanggap' untuk membantu lebih dari 17.250 masyarakat bisnis, terutama perempuan dan orang-orang cacat, untuk menggantikan aset-aset mereka.



Diatas: Penduduk desa di Yogyakarta menerima pelatihan langsung untuk membangun rumah-rumah tahan gempa. Foto: AusAID

Kiri: Mbak Yanti di depan warung baru. Foto: AusAID

Cakrawala bisnis baru

Mbak Yanti, yang berusia 40 tahu, melihat rumah dan kiosnya di dusun Sanan di kaki Gunung Sewu hancur oleh gempa bumi yang terjadi di Yogyakarta.

Setelah kehilangan mata pencaharian, Mbak Yanti dan dua anaknya terpaksa hidup dengan orang tuanya yang sudah lanjut usia. Tanpa pendapatan dan tanpa modal atau peralatan, kehidupan mereka sangat suram.

Pada bulan Maret 2007, Mbak Yanti diterima sebagai bagian dari kelompok perempuan untuk menerima bantuan mata pencaharian AusAID melalui SP Kinasih, sebuah LSM lokal yang menjalankan proyek-proyek untuk membantu memberdayakan perempuan. Ia menggunakan sebagian dari bantuan sebesar \$250 itu untuk memulai kembali usahanya, dengan membeli kompor, panci, dan penanak nasi baru serta bahan-bahan mentah, meja dan kursi. Ia menggunakan sebagian dari bantuan tersebut untuk menyewa warung baru di tempatnya.

Usaha Mbak Yanti sekarang berkembang dan ia berencana memperluas usahanya ke lokasi lain.

Pembangunan daerah

Mendorong pembangunan sektor pedesaan di Indonesia bagian timur

Sebagian besar penduduk Indonesia hidup di daerah pedesaan. Australia melanjutkan pendanaan proyek-proyek untuk meningkatkan produktifitas petani dan akses menuju pasar termasuk melalui program *Smallholder Agribusiness Development Initiative* senilai \$38 juta, yang dirancang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan di pedesaan di Indonesia bagian timur.

Inisiatif tersebut dimulai di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur yang memiliki potensi pertanian yang signifikan namun memiliki produktifitas dan penghasilan yang rendah. Tujuannya adalah untuk meningkatkan produktifitas petani, nilai tambah produk baik dari bidang pertanian maupun dari luar pertanian serta membangun akses yang lebih baik ke pasar.

Tujuh produk pertanian dianalisa pada 2007 untuk menentukan prospek pasarnya dan perjanjian kemitraan ditandatangani dengan pabrik-pabrik makanan besar dalam produk kakao, kopi, hortikultura bernilai tinggi dan kacang. Prospeknya terlihat positif. Contoh, kemitraan dengan Garuda Foods untuk makanan ringan di Lombok yang dimulai pada 2008 diharapkan akan mengurangi biaya operasional dan meningkatkan pendapatan para petani kacang, masing-masing hingga 20 persen.

Didanai berdasarkan AIPRD, inisiatif tersebut dijalankan dengan Program Nasional untuk Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Indonesia (PNPM), Pusat Penelitian Pertanian Internasional Australia (ACIAR), Bank Dunia dan Internasional Finance Corporation (IFC).

Program Bantuan Australia-Nusa Tenggara untuk Otonomi Daerah (ANTARA) senilai \$31 juta saat ini sedang berjalan. Bersama-sama dengan pemerintah propinsi dan kabupaten di Nusa Tenggara Timur program tersebut bertujuan untuk mengurangi kemiskinan melalui pembangunan sosial dan ekonomi pedesaan yang berkelanjutan.

Contoh, sebuah program untuk membantu usaha kecil dan menengah, terutama dalam bidang pertanian dan kerajinan, telah mengurangi biaya pendaftaran bisnis hingga 75 persen. Produktifitas para petani di daerah-daerah sasaran naik 26 persen dan pendapatan mereka tumbuh 18 persen. Program bank mobil meningkatkan pelayanan keuangan dan kredit mikro di sektor tersebut.

ANTARA juga bekerja dengan erat dengan program-program AusAID lainnya di propinsi tersebut dalam bidang kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan pemerintahan. Contoh, ANTARA telah membantu pemerintah daerah untuk meningkatkan anggaran dan proses perencanaan mereka yang pada gilirannya akan meningkatkan pelayanan dan keterlibatan masyarakat umum dalam pemerintahan.

Mata pencaharian baru di Aceh

Prioritas pada tahun 2007 adalah bagaimana mengembalikan masyarakat Aceh pada pekerjaan-pekerjaan mereka untuk mendapatkan penghasilan, termasuk usaha pertanian dan usaha kecil.

Budi daya air adalah industri yang berkembang di Aceh sebelum tsunami, yang secara langsung mempekerjakan lebih 100.000 orang. Udang galah yang ditujukan untuk pasar ekspor, memiliki nilai produksi tahunan \$50 juta. Namun tsunami menghancurkan lebih dari setengah tambak dan pembudidayaan udang dan ikan di propinsi tersebut. Tahun 2007, berbagai upaya untuk mengajarkan cara mengelola hasil panen pra petani udang



Diatas: Percobaan bertani membantu para petani meningkatkan hasil panen dan produktifitas. Foto: Adi Rahmatullah

Kiri: Seorang penambak membawa hasil tangkapannya udang Monodon Aceh, salah satu yang terbaik di dunia. Industri budi daya air turut dipulihkan setelah hancur akibat tsunami. Foto: International Finance Corporation

lokal mampu meningkatkan hasil rata-rata dari 150 hingga 192 kilogram per hektar. Hal ini akan mendapat dukungan lebih lanjut ketika pusat pelatihan dan budi daya udang akuakultur Aceh selesai pada pertengahan 2008.

AusAID dan International Finance Corporation membuka *Investor Outreach Office* pada bulan Maret 2007 sebagai bagian dari program senilai \$7 juta untuk mendorong investasi di sektor swasta di Aceh. Kantor tersebut memberikan dukungan bagi 40 investor dan memberikan pelatihan bisnis bagi 800 orang.

Meningkatkan manajemen ekonomi

Dukungan Australia untuk upaya Pemerintah Indonesia meningkatkan kebijakan dan manajemen ekonomi memberikan sumbangan pada perbaikan keseluruhan kinerja ekonomi Indonesia pada 2007. Contohnya, Indonesia berhasil menjaga pertumbuhan yang signifikan dan tetap dari penerimaan pajak dan pengurangan biaya pembayaran utang, yang keduanya merupakan fokus-fokus utama dari kemitraan dengan Australia.

Australia membantu Departemen Keuangan Indonesia untuk mengidentifikasi dan melibatkan para wajib pajak potensial dan menaikkan tarif dasar pajak. Hal ini memberikan sumbangan pada peningkatan penerimaan pajak non minyak Indonesia dari 3,6 persen dari Produk Domestik Bruto pada 2005 menjadi 5,7 persen pada 2007—peningkatan yang hampir mencapai 60 persen.

Badan-badan pemerintah Indonesia bekerja sama dengan mitranya di Australia di bawah Dana Kemitraan Pemerintah (GPF) untuk memperkuat penerapan kebijakan pengelolaan sektor ekonomi, keuangan dan publik di Indonesia dengan saling bertukar pikiran dan pengetahuan. *Australian Prudential Regulatory Authority* dan Departemen Keuangan, misalnya, bekerja bersama-sama untuk membuat sistem pengawasan bank berbasis resiko untuk Indonesia yang bertujuan memberikan kontribusi bagi stabilitas sektor keuangan.

Pertumbuhan ekonomi dengan pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan

Perubahan iklim dan lingkungan menjadi titik perhatian ketika Indonesia menyelenggarakan pertemuan *United Nations Framework Convention on Climate Change* pada bulan Desember 2007 di Bali. Dalam pertemuan tersebut, Pemerintah Australia meratifikasi Protokol Kyoto dan menyatakan akan mendukung negara berkembang di wilayahnya untuk mengurangi gas efek rumah kaca.

Peristiwa-peristiwa besar ini diikuti dengan penandatanganan bersama oleh Pemerintah Australia dan Indonesia untuk memotong emisi gas efek rumah kaca sekitar 700 juta ton selama 30 tahun. Australia menjanjikan \$30 juta hingga \$100 juta untuk Hutan Kalimantan dan Kemitraan Iklim, yang bertujuan melindungi 70.000 hektar hutan di Kalimantan, mengairi kembali 200.000 hektar lahan yang sudah kering dan menanam hingga 100 juta pohon baru untuk merehabilitasi lahan kering untuk tujuan konservasi. Pembuatan cakupan kerja awal selesai pada 2007 dan perancangan program akan dilakukan pada 2008.

Sebanyak \$10 juta lainnya dialokasikan untuk mendukung pengembangan kebijakan. Dana tersebut merupakan bagian dari Inisiatif Karbon Hutan Internasional senilai \$200 juta, yang dipimpin oleh AusAID dalam kemitraan dengan Departemen Perubahan Iklim.

Australia juga menyediakan dukungan keuangan dan teknis untuk grup multi donor—Aliansi Iklim Hutan Indonesia, dan mendukung Indonesia untuk membuat sistem informasi sumberdaya hutan dan pengawasan karbon.

Investasi pada Masyarakat

Garis Besar

Ratusan sekolah yang dibangun atau diperluas melalui Program Pendidikan Dasar Australia-Indonesia (AIBEP) senilai \$355 juta telah dibuka dan kualitas pendidikan ditingkatkan. Program tersebut termasuk program utama dari AIPRD dan telah memberikan kontribusi yang besar pada tujuan Pemerintah Indonesia untuk menyediakan pendidikan dasar sembilan tahun yang berkualitas bagi anak. Sementara itu ratusan warga Indonesia menerima beasiswa untuk belajar di perguruan-perguruan tinggi di Australia.

Kesehatan meningkat, terutama di daerah-daerah miskin dan terpencil. Australia bekerja untuk membantu Indonesia untuk memenuhi MDGs untuk mengurangi dan mengubah area penyebaran HIV/AIDS dan untuk mengurangi tingginya jumlah kematian wanita selama kehamilan dan persalinan. Bantuan dilanjutkan untuk membantu Indonesia menangani flu burung pada manusia dan unggas serta untuk memperkuat sistem kesehatan dengan meningkatkan akses untuk mendapatkan pelayanan yang berkualitas.

Australia terus membangun kembali tenaga-tenaga kesehatan dan pendidikan yang banyak hilang di Aceh akibat terjangkit tsunami. Pelatihan dan bantuan langsung diberikan pada generasi guru, perawat, dokter dan dosen selanjutnya, dan fasilitas-fasilitas perguruan tinggi diperbaharui, termasuk Universitas Syiah Kuala di Aceh.

Memberikan kontribusi kepada penduduk yang sehat dan berpendidikan tetap menjadi fokus kuat di tahun 2007.



Diatas: Murid laki-laki dan perempuan belajar bersama di sebuah pameran pendidikan yang didanai Australia di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur. Foto: AusAID

Kiri: Masyarakat di Kintamani turut terlibat dalam pembangunan sekolah baru mereka, yang diresmikan di 2007. Ini hanyalah salah satu dari 2000 sekolah yang dibangun atau diperluas dengan dana bantuan Australia. Foto: AusAID

Indahnya peningkatan melek huruf dan melek angka

Melihat senyum anak kecil yang baru belajar membaca, menulis atau menghitung membahagiakan hati setiap guru dan orang tua. Namun, melihat peningkatan melek huruf dan melek angka jauh lebih membahagiakan. Ini merupakan kemajuan bangsa terutama negara berkembang seperti Indonesia.

Kemitraan Pendidikan Sekolah Dasar Nusa Tenggara Timur telah menghasilkan kemajuan yang sangat besar dalam mendidik murid sekolah dasar dan meningkatkan cara guru menangani kelas mereka.

Kepala sekolah kampung di Ende mengatakan bahwa sekolah biasanya didominasi oleh guru yang pembelajaran sebagai sesuatu yang bersifat satu arah – mereka akan ‘bicara’, tidak ‘melakukan’. ‘Cara-cara baru tersebut dapat dengan mudah dipahami oleh anak-anak...’ kata kepala sekolah tersebut, ‘...mereka berani menjawab pertanyaan dan mengajukan pertanyaan. Kelas sekarang menyenangkan, menarik, menantang dan ada pembelajaran yang menyenangkan.’

Orang tua yang juga sekretaris komite sekolah mengungkapkan hal serupa: “Murid terlihat lebih bahagia dan ingin berada di dalam ruangan kelas.”

Diatas: Murid-murid sekolah di Nusa Tenggara Timur belajar abjad dan membaca sebagai bagian dari upaya meningkatkan melek huruf. Foto: AusAID



Pendidikan

Sekolah permanen milik para siswa

Banyak anak-anak di Indonesia, terutama di daerah-daerah miskin dan terpencil, tidak memiliki akses pendidikan yang layak. Sekolah terdekat seringkali terlalu jauh dan tidak memiliki peralatan yang memadai.

Program Pendidikan Dasar Australia-Indonesia (AIBEP) berupaya mengatasi masalah ini dengan membangun atau memperluas 2.000 sekolah—1500 sekolah umum dan 500 sekolah Islam—pada akhir 2009. Ini akan menciptakan lebih dari 330 ruang belajar baru bagi anak-anak usia 7 hingga 9 tahun di negara yang hampir dua juta anaknya yang berusia 13 hingga 15 tahun tidak dapat bersekolah.

Pada putaran pertama pembangunan sekolah yang selesai pada 2007, 380 telah dibuka, termasuk peresmian masal 46 sekolah madrasah pada bulan Agustus, dan pembangunan sudah dimulai untuk 540 sekolah lainnya.

Sekolah tersebut dibangun oleh penduduk setempat di bawah kepemimpinan komite pembangunan masyarakat, dengan tenaga teknis yang didanai oleh AusAID yang menjamin bahwa struktur-struktur tersebut memenuhi standar pembangunan yang tinggi.

Di Aceh, Australia membangun dan melengkapi sembilan sekolah dan enam lainnya akan diselesaikan pada 2008, sebagai bagian dari AIPRD. Di Yogyakarta, 27 taman kanak-kanak dan sekolah dasar dibangun atau direnovasi setelah gempa bumi pada 2006.

Hasil dari peningkatan akses terhadap pendidikan ini, jumlah anak yang masuk ke sekolah lanjutan pertama bertambah sekitar 73,000 murid.

Peningkatan kualitas pendidikan dan manajemen sekolah yang lebih baik

Program AIBEP juga berusaha meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah-sekolah Indonesia dan memperkuat cara pengelolaan pelayanan pendidikan. Pada 2007, program pengembangan untuk sekolah dan pendidikan di kabupaten memfokuskan pada pengembangan rencana-rencana strategis untuk peningkatan kualitas dan standar, dengan memperbaiki bahan pengajaran dan pelatihan bagi guru dan administrasi sekolah.

Australia mendukung Pemerintah Indonesia untuk mengembangkan standar pendidikan nasional, meningkatkan sistem ujian nasional dan mengembangkan kebijakan yang inklusif untuk menjamin bahwa pendidikan juga tersedia bagi anak-anak cacat. Australia juga memberikan saran mengenai keputusan yang dikembangkan untuk mengarus-utamakan jender di sekolah dan meningkatkan jumlah murid, guru, dan administrator perempuan. menjadi penting karena dua pertiga dari hampir 13 juta orang Indonesia yang buta huruf adalah perempuan.

Di beberapa daerah, hasil yang dicapai selama tahun tersebut sangat mengagumkan. Hampir setengah dari murid baru yang masuk ke sekolah yang dibangun oleh AIBEP adalah anak perempuan, sebuah peningkatan yang berarti karena di Indonesia jumlah perempuan yang masuk ke sekolah menengah pertama lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah anak laki-laki.

Di Nusa Tenggara Timur, kemitraan pendidikan senilai \$27 juta, telah secara signifikan meningkatkan jumlah melek huruf murid-murid sekolah dasar di Kabupaten Ende, Ngada dan Sikka, dari 42 persen menjadi 63 persen dalam empat tahun. Guru kelas 1, 2 dan 3 dilatih untuk menjalankan metodologi pengajaran dan pembelajaran baru, dan anak-anak sekarang bisa membaca, menulis dan menghitung dengan lebih cepat. Program tersebut juga menciptakan persamaan jender yang lebih besar dengan peningkatan jumlah kepala sekolah perempuan sebesar 80 persen dan jumlah pengawas perempuan sebesar 200 persen.

Pendidikan Islam

Sekitar satu dari empat anak Indonesia menerima paling tidak sebagian dari pendidikan formal mereka di sekolah Islam. Namun kualitas pendidikannya berada di bawah kualitas sekolah-sekolah umum yang disediakan oleh pemerintah.

Program lima tahun Australia senilai \$30 juta untuk meningkatkan sekolah-sekolah Islam diupayakan untuk mengatasi ketidakseimbangan ini. Inisiatif baru mulai pada 2007 untuk mendorong peluang belajar yang setara bagi anak laki-laki dan perempuan, meningkatkan kemampuan pengajaran bahasa Inggris 750 guru sekolah menengah atas dan memberikan kontribusi pada tujuan pemerintah Indonesia untuk menjamin bahwa semua guru memiliki kualifikasi mengajar program diploma.

Untuk lebih memperkaya pengajaran di sekolah-sekolah Islam sebuah simposium regional mengenai pendidikan dasar diselenggarakan pada bulan Juli 2007 bekerja sama dengan Departemen Agama dan Universitas Islam Negeri Jakarta. 'Menjembatani Perbedaan—Visi 2025' menarik sekitar 200 peserta dari pemerintah Australia dan Indonesia, LSM lokal dan internasional serta para donor.

Di Aceh, Australia terus bekerja bersama dengan masyarakat untuk membangun kembali sekolah-sekolah Islam yang rusak akibat konflik. Sekolah-sekolah tersebut dihadiri oleh anak-anak paling miskin dan, melalui program \$33 juta tersebut, Australia juga telah melatih guru dan membantu pemerintah Propinsi untuk mengelola pendidikan dengan lebih baik, termasuk membuat sebuah rencana strategis pendidikan pada 2007.



Allison Sudradjat Leadership Awards

Pada Mei 2007, program tahunan Allison Sudradjat Awards diumumkan untuk mengenang mantan Perwakilan Senior AusAID di Indonesia, yang wafat dalam kecelakaan Penerbangan Garuda 200 di Yogyakarta pada 7 Maret 2007. Allison adalah pakar dalam kepemimpinan dan pembangunan di daerah. Penghargaan tersebut akan diberikan setiap tahun pada empat besar penerima Penghargaan Kepemimpinan Australia dari Indonesia dan dua dari Papua New Guinea, tempat di mana ia juga pernah bekerja.

‘[LSM kami] selalu merasa terlibat dalam proses pengambilan keputusan [mengenai program HIV]. Ini adalah sesuatu yang bersifat positif. Mungkin dengan donor-donor lain, hal ini tidak terjadi. Konsultasi jenis ini sangat penting untuk memperkuat program tersebut agar kemitraan ini dapat mengalami kemajuan.’

Yayasan KB, AusAID funded NGO working in Jayapura prisons

Manfaat jangka panjang melalui beasiswa

Australia telah menawarkan beasiswa pada masyarakat Indonesia sejak 1950an, dengan membangun hubungan antar masyarakat yang bertahan lama dan memperkuat kemampuan sumberdaya manusia dari organisasi sektor publik dan swasta.

Beasiswa *Australian Leadership Awards* ditawarkan kepada mereka yang berprestasi dan para calon pemimpin dalam pembangunan sosial dan ekonomi dari Asia-Pasifik. Pada 2007, sebanyak 21 pakar dipilih dari Indonesia untuk belajar di perguruan tinggi-perguruan tinggi di Australia dan 64 fellows ditempatkan di organisasi-organisasi di Australia.

Enam ratus Beasiswa Kemitraan Australia untuk program pasca sarjana, yang didanai oleh AIPRD diberikan selama 2007. Dari jumlah itu, 149 beasiswa menyelesaikan studi mereka dan kembali ke Indonesia.

Program *Australian Development Scholarships* diberikan kepada 270 pelajar untuk melakukan penelitian di bidang-bidang yang mendapatkan prioritas untuk Kemitraan Australia Indonesia, antara lain manajemen ekonomi, lembaga-lembaga dan praktek-praktek demokrasi, pelayanan sosial dasar, serta keamanan dan stabilitas. Konferensi alumni diadakan pada 2007 untuk membahas masalah-masalah yang terkait dengan prioritas-prioritas pembangunan Indonesia.

Kesehatan

Mengurangi penyebaran HIV

Epidemi HIV di Indonesia adalah salah satu yang tercepat tumbuh di Asia, dan di Papua serta Papua Barat, satu dari 40 orang dewasa memiliki virus tersebut.

Untuk melawan penyebaran HIV dan meningkatkan kualitas hidup mereka yang hidup dengan virus HIV, pada tahun 2007 Australia mengumumkan sebuah Kemitraan Australia Indonesia untuk HIV senilai \$100 juta. Pekerjaan tersebut mulai pada 2008. Ini adalah langkah selanjutnya untuk membantu Indonesia memenuhi MDGs untuk mengurangi dan melawan penyebaran HIV/AIDS pada 2015 dan memperbaiki perawatan bagi orang yang hidup dengan virus HIV.

Sementara itu, aktivitas terus berlangsung dengan para pengguna obat-obatan suntik (50 persen dari mereka positif mengidap HIV), pekerja seks komersial dan pengguna pekerja seks komersial, serta masyarakat umum di Papua dan Papua Barat, dimana tingkat resiko terinfeksi di antara orang dewasa merupakan yang tertinggi di Asia.

Australia membantu membentuk sebuah kebijakan HIV nasional untuk mencegah penyebaran penyakit tersebut dengan menjalankan program jarum suntik (needle syringe program) dan methadone. Semua propinsi yang didukung oleh proyek pencegahan dan perawatan HIV senilai \$41 juta membuat peraturan-peraturan yang mendukung kebijakan baru tersebut.

Tiga klinik perawatan methadone baru yang didanai AusAID di puskesmas-puskesmas buka di Jakarta pada bulan Desember 2007 dan telah mendapat penerimaan yang baik. Klinik-klinik tersebut menyediakan program jarum suntik, pendidikan, konseling, dan pemeriksaan bagi para pengguna obat, serta akses untuk mendapatkan perawatan dengan obat-obatan anti retroviral.

Program jarum suntik di Jawa meningkat dari sekitar 30 pada awal 2007 menjadi lebih dari 100 pada akhir tahun tersebut. Program-program ini dan program perawatan pemeliharaan

methadone berlangsung di Bali, Sulawesi Selatan, Jawa Barat dan Jawa Timur, termasuk penjara Kerobokan dan Bancuey.

Upaya yang signifikan dilakukan untuk meningkatkan kesadaran publik untuk menghilangkan stigma sekitar HIV dan meningkatkan pemahaman tentang resiko tertular. Atas permintaan kantor berita nasional Indonesia, Antara, para wartawan menerima pelatihan mengenai masalah kesehatan dan hukum agar mereka dapat memberitakan masalah-masalah itu dengan akurat dan tidak berpihak.

Kesehatan dan HIV dimasukkan dalam bahan pengajaran yang digunakan oleh semua sekolah di kabupaten di Flores dan bahan pelatihan bagi para guru di sekolah-sekolah Islam telah dikembangkan dan akan digunakan pada 2008.

Pada bulan November 2007, Duta HIV Australia kala itu, Annmaree O'Keeffe, menghadiri sebuah simposium di Jayapura mengenai HIV di Papua, Papua Barat dan Papua New Guinea.

Flu Burung

Flu burung terus menjadi keprihatinan Indonesia. Pada 2007, 42 kasus dilaporkan terjadi pada manusia, dan 37 diantaranya meninggal. Infeksi pada unggas mempengaruhi mata pencaharian dan mengurangi sumber makanan masyarakat miskin.

Australia melanjutkan program \$30 juta-nya untuk membantu Indonesia mendeteksi dan mengatasi kasus-kasus yang terjadi pada manusia dan mencegah serta mengontrol penyakit tersebut pada unggas. Program ini melibatkan kerja sama dengan Indonesia pada tingkat nasional dan daerah, serta dengan negara-negara donor besar lainnya dan organisasi-organisasi multilateral, terutama Organisasi Kesehatan Dunia, Organisasi Pangan dan Pertanian, Bank Dunia, dan *United States Agency for International Development*.



Diatas: Pekerja kesehatan hewan dilatih mengenai hal pengawasan dan respon terhadap flu burung di peternakan, sehingga dapat mendeteksi awal kemungkinan perjangkitan. Foto: Donang Wahyu

Kiri: Klinik metadon memberikan pendidikan, konseling dan perawatan bagi para pengguna narkoba, untuk membantu mencegah penyebaran HIV. Foto: Donang Wahyu



Australia membantu wanita di beberapa propinsi terpilih mencapai kehamilan dan persalinan yang aman, dengan meningkatkan jumlah persalinan yang didampingi oleh bidan terlatih, sejalan dengan strategi nasional "Membuat Persalinan Selamat". Foto: AusAID

Penelitian dan respon terhadap kasus-kasus yang terjadi pada manusia meningkat setelah posko flu burung dibentuk di Departemen Kesehatan dan panduan flu burung dibuat serta disebar. Hasilnya, tim Indonesia bisa mengatasi kasus-kasus tunggal tanpa komplikasi pada manusia tanpa membutuhkan bantuan dari para pakar internasional.

Di Jawa, Bali, dan Sumatra, para dokter hewan dilatih dalam hal pengamatan dan pemberian respon terhadap penyakit, sehingga wabah unggas dapat diketahui lebih awal. Mereka juga membantu penduduk desa untuk merespon berbagai wabah. Program pelatihan tersebut akan diperluas ke Sulawesi Selatan dan Sulawesi barat pada 2008.

Staff karantina dilatih untuk menggunakan analisa resiko dalam operasional karantina dan teknik-teknik untuk mengukur kesadaran masyarakat. Kemampuan laboratorium Indonesia untuk menganalisa sampel meningkat terus – saat dilakukan audit eksternal 70 persen hasil yang dicapai sebanding dengan lab-lab Australia.

Meningkatkan ketahanan ibu dan anak

Tingkat kematian ibu di Indonesia adalah salah satu yang tertinggi di Asia Timur. Untuk setiap 100.000 kelahiran, hingga 400 wanita kehilangan nyawanya sebagai akibat dari komplikasi yang terjadi selama kehamilan dan setelah persalinan.

Di beberapa propinsi, tingkat kematiannya bahkan lebih buruk: di Papua, 1116 perempuan meninggal dari setiap 100.000 kelahiran hidup, sementara di Nusa Tenggara Timur tingkat kematiannya adalah 554. Bandingkan dengan enam kematian per 100.000 kelahiran di Australia.

Program AusAID berusaha membuat kehamilan dan persalinan lebih aman bagi perempuan di beberapa propinsi dengan meningkatkan jumlah persalinan yang ditangani oleh bidan terlatih, sejalan dengan strategi nasional untuk Membuat Kehamilan Lebih Aman dan seruan Gubernur Papua, yang dikenal dengan istilah RESPEK.

Bekerja bersama-sama dengan UNICEF, AusAID memperkuat penyediaan dan permintaan kesehatan ibu dan anak di seluruh Papua dan Papua Barat.

Enam puluh bidan di Papua—sekitar lima persen—dilatih dasar-dasar persalinan pada 2007, dengan 86 persen menunjukkan kecakapannya dalam tiga bulan kemudian. Ini berarti paling sedikit 1000 perempuan pada usia reproduksi dan 1800 anak balita kini lebih dapat dilayani oleh para bidan, yang secara signifikan meningkatkan peluang hidup mereka.

Inisiatif-inisiatif ini didukung oleh kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai kebutuhan dan manfaat perawatan kesehatan selama kehamilan dan persalinan.

Di Nusa Tenggara Timur, AusAID memulai sebuah percontohan untuk sebuah program nasional baru senilai \$49 juta untuk membantu Indonesia memenuhi MDGs untuk kesehatan ibu dan anak. Program tersebut akan meningkatkan akses pada bidang terlatih selama kehamilan dan persalinan, membantu pemerintah kabupaten untuk secara efektif mengelola pelayanan kesehatan ibu dan bayi dan meningkatkan pendanaan untuk dukungan tingkat masyarakat bagi ibu baru dan calon ibu. Penasehat kesehatan daerah ditempatkan bersama-sama pemerintah untuk merencanakan kegiatan-kegiatan kesehatan ibu dan anak yang paling tepat.

Di Aceh, sebuah fasilitas pelatihan kesehatan berstandar internasional dibangun di Universitas Syiah Kuala yang menghasilkan lebih dari 100 sarjana ilmu kesehatan termasuk bidan, setiap tahunnya.

Australia Bali Memorial Eye Centre dibuka

Australia Bali Memorial Eye Center secara resmi telah dibuka pada bulan Agustus 2007 untuk mengenang para korban bom Bali pada 2002. Pusat tersebut didukung oleh klinik mobil dan menghindari kebutaan penduduk daerah yang menderita kondisi-kondisi seperti katarak.



Diatas: Bidan Fride mengunjungi bayi berusia satu hari, membantu sang ibu setelah melahirkan secara normal di rumah. Di Sumba Timur, hanya sekitar 60 persen bayi-bayi yang dilahirkan dengan bantuan bidan dan banyak wanita masih memilih melahirkan di rumah. Foto: Jenny Kerrison, AusAID

Kiri: Australia Bali Memorial Eye Centre merawat pasien yang menderita penyakit seperti katarak dan membantu mereka melihat kembali. Foto: Donang Wahyu

Demokrasi, keadilan dan tata pemerintah yang baik

Garis besar

Lembaga dan sistem pemerintahan yang kuat dan transparan sangat penting agar bisa memberikan pelayanan yang adil dan efektif kepada masyarakat. Tata pemerintahan yang baik juga menciptakan lingkungan dimana sektor swasta membangun dan berinvestasi sambil memastikan bahwa sumberdaya negara digunakan secara berkelanjutan. Pada saat yang bersamaan, masyarakat sipil yang kuat penting untuk membuat pemerintah bertanggung jawab dan menyuarakan kebutuhan masyarakat.

Selama 2007, Indonesia melanjutkan proses yang dimulai dengan transisi menuju demokrasi pada 1999. Pemilihan Umum dilaksanakan di 54 daerah, termasuk di seluruh Aceh, untuk memilih Gubernur Jakarta. Australia mendukung masyarakat sipil untuk memonitor pemilihan umum. Dukungan juga diberikan untuk program percontohan pendidikan bagi para pemilih dan meningkatkan kesadaran mengenai proses pemilihan umum dan mengenai hak-hak serta tanggung jawab rakyat untuk memilih.

Australia memberikan saran teknis kepada Indonesia ketika Indonesia mengalami kemajuan untuk menjadi lebih akuntabel, transparan, dan tanggap pada tingkat nasional, propinsi dan daerah. Kemajuan yang berarti juga dicapai dalam hal akses untuk mendapatkan keadilan.

Pemilihan umum yang terbuka, adil dan demokratis

Ketika pemilihan umum di daerah dilakukan di seluruh pelosok negeri, AusAID mendanai The Asian Foundation untuk memberikan saran pada jaringan nasional LSM Indonesia yang dikenal sebagai Jaringan Pendidikan untuk Rakyat (JPPR).

JPPR adalah jaringan yang terdiri dari 35 LSM untuk pendidikan pemilih dan akuntabilitas pemilihan. Selama pemilihan umum tersebut, dilakukan 21 debat calon kandidat non partai dengan partisipasi para pemilih dan mempublikasikan janji-janji kebijakan para calon, sehingga mereka dipaksa untuk bertanggung jawab.

Salah satu peranan yang paling penting dari JPPR adalah memonitor pemilihan umum untuk memeriksa apakah pemilihan tersebut bebas dan adil. Lebih dari 10.000 sukarelawan yang memenuhi syarat dikirim ke 7.000 desa untuk memonitor 49 pemilihan umum daerah. Kehadiran mereka tidak hanya bertindak sebagai pembuat jera bagi mereka yang berniat untuk mengintimidasi para pemilih atau mengacaukan pemilihan umum tersebut, para pengawas tersebut juga melaporkan dan menyebarluaskan hasil pengamatan mereka (termasuk pada anggota Dewan Perwakilan Rakyat, badan-badan pemilihan umum, akademisi dan media).

Ini juga merupakan tahun pemilihan umum pertama untuk Nanggroe Aceh Darussalam. Pada bulan Maret, propinsi tersebut pertama kali mencalonkan calon independen ketika warga dari Aceh Barat dan Aceh Barat Daya memilih Bupati dan wakil Bupati. Hal ini menyusul pemilihan umum langsung yang pertama di propinsi tersebut, yang

diselenggarakan sebagai bagian dari proses perdamaian pada 11 Desember 2006, dimana Gubernur dipilih.

Australia memberikan kontribusi bagi peristiwa-peristiwa bersejarah ini dengan bergabung dengan USAID untuk mendanai Jurdil Aceh, sebuah koalisi LSM lokal, untuk mengaudit pendaftaran pemilih. Koalisi tersebut menemukan bahwa 86,9 persen dari pemilih yang sah terdaftar, yang menunjukkan keberhasilan dari pendidikan bagi para pemilih dan pendaftaran pemilihan.

Pada 5 September 2007, masyarakat Aceh Jaya melakukan pemilihan langsung yang pertama secara bersamaan, dimana 138 desa memilih kepala desa pada hari yang bersamaan. Pemilihan secara bersamaan di 178 desa di Aceh Besar itu dilaksanakan pada bulan November.

Australia memainkan peranan penting dalam pemilihan-pemilihan ini, termasuk dengan bekerja sama dengan pemerintah kabupaten Aceh Jaya untuk mempersiapkan peraturan pemilihan. Para wanita didorong untuk berperan dan empat orang mencalonkan diri. Hasilnya dua perempuan terpilih sebagai kepala desa. Yang penting, warga menjadi sadar tentang hak dan kewajibannya untuk memilih dan untuk meminta pertanggungjawaban kepala desa mereka dalam pemilihan berikutnya jika kebutuhan mereka tidak terpenuhi.

Pekerja dari Jaringan Pendidikan Pemilih Rakyat membagikan informasi untuk mendidik pemilih dalam pemilihan langsung gubernur Jakarta. Foto: Irene Insandjaja, AusAID



‘Sejak LOGICA menciptakan [layanan satu pintu], proses tersebut menjadi lebih transparan. Kami tidak perlu lagi melakukan banyak perjalanan ke kantor yang jaraknya jauh, yang mana kami tidak tahu apakah kantor itu buka atau tidak ketika kami sampai di sana. Sekarang hubungan saya dengan pemerintah daerah sangat teratur dan tertib.’

Bapak Zulfikar, warga Peukan Bada

Reformasi hukum meningkatkan akses ke keadilan

SigKemajuan yang signifikan dicapai untuk meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat yang terpinggirkan dan miskin dengan dukungan yang diberikan melalui *Australia's Legal Development Facility*.

AusAID dan Pengadilan Keluarga di Australia bekerja sama dengan Mahkamah Agung Indonesia untuk melaksanakan penelitian mengenai akses dan persamaan dalam skala besar pertama di Pengadilan Agama di Indonesia. Pengadilan-pengadilan itu memutuskan masalah-masalah hukum keluarga untuk masyarakat muslim Indonesia dan lebih dari 60 persen penggunanya adalah perempuan.

Penelitian tersebut menemukan bahwa para pengguna merasa sangat puas dengan pengalaman mereka. Namun, penelitian tersebut juga menemukan hal lain bahwa pengguna, terutama perempuan dan masyarakat miskin, tidak menggunakan pengadilan tersebut karena mereka menganggap prosedurnya terlalu rumit dan tidak mampu untuk membayar biaya yang harus dikeluarkan, yang akibatnya mereka rentan terhadap siklus kemiskinan yang berkelanjutan.

Dalam menanggapi penelitian tersebut, Mahkamah Agung Indonesia meningkatkan anggaran untuk Pengadilan Negeri agar mereka dapat menghapuskan biaya untuk kasus-kasus tertentu, memberikan lebih banyak persidangan di tempat-tempat terpencil dan memberikan informasi yang lebih baik mengenai bagaimana cara memanfaatkan pengadilan-pengadilan tersebut.

Australia juga memberikan sumbangan bagi pembuatan rancangan undang-undang agar masyarakat biasa dapat mengakses pengadilan dengan harga yang terjangkau dan mendukung Mahkamah Agung untuk meningkatkan transparansi dalam sistem peradilan dengan mempublikasikan putusan-putusannya.

Pengawasan korupsi

Survei Indeks Persepsi Korupsi nasional kedua, yang dilakukan oleh Transparansi Internasional Indonesia setiap dua tahun, dipublikasikan pada Februari 2007. Didanai oleh Fasilitas Pengembangan Hukum, survei tersebut menanyai lebih dari 1.700 pebisnis di 32 lokasi mengenai pengalaman mereka terkait dengan korupsi badan-badan publik. Survei ini, dan yang lainnya, menunjukkan bahwa ketika masyarakat Indonesia memandang upaya anti korupsi pemerintah pada 2007 lebih efektif dibanding tahun 2006, namun masih ada keyakinan umum bahwa korupsi masih tersebar.

Reformasi pelayanan publik

Di Nanggroe Aceh Darussalam, Australia membantu pemerintah daerah untuk menerapkan ‘layanan satu pintu’ untuk memberikan pelayanan dengan lebih cepat, murah dan transparan. Anggota masyarakat dapat mengunjungi satu kantor pemerintahan untuk mendapatkan layanan dengan segera, seperti alokasi perumahan, bantuan kesejahteraan dan pendaftaran akta kelahiran, kematian dan perkawinan. Layanan satu pintu pertama dibuka pada April 2007 dan sekarang 35 Kecamatan di NAD menggunakan dana mereka untuk meniru reformasi-reformasi ini.

Australia juga berperan serta dalam kelompok kerja donor untuk mereview strategi reformasi tata pemerintahan Nanggroe Aceh Darussalam.

Selama 2007, hubungan antara pelayanan publik Australia dan Indonesia serta perguruan tinggi-perguruan tinggi terus memberikan kontribusi untuk menciptakan tata pemerintahan yang baik melalui pertukaran ketrampilan. Hubungan antar lembaga



ini membuah hasil yang positif. Contoh, kemitraan antara Lembaga Ilmu Kelautan Australia dan Pemerintah Indonesia menghitung potensi komersial dari sumberdaya laut Indonesia. Badan Pengelolaan Lahan dan Properti Australia Barat melatih para pejabat Indonesia cara menggunakan satelit untuk memonitor kebakaran hutan, yang di masa lalu telah menyebabkan kabut asap yang mengganggu negara-negara tetangga.

Proyek pelatihan khusus yang mengembangkan pelatih-pelatih yang terampil dalam pelayanan publik kini diadaptasi oleh beberapa badan di Indonesia pada 2007, termasuk Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara. Sepertiga pesertanya adalah perempuan.

Pemberdayaan perempuan dan masyarakat miskin

Perempuan dan masyarakat miskin di Indonesia sering mengalami kesulitan untuk berperan serta dalam pembuatan keputusan dan membuat agar kebutuhan mereka didengar. Pada 2007, *Australian Community Development and Civil Society Strengthening Scheme* (ACCESS) melanjutkan pengembangan kemampuan dan kepercayaan masyarakat untuk menyelesaikan kebutuhan-kebutuhan pembangunan yang menjadi prioritas dan menyuarakan keprihatinan mereka mengenai pemerintah daerah.

Proses penilaian dan perencanaan yang dipimpin oleh masyarakat ini telah digunakan di hampir 300 desa, termasuk di Kabupaten Jeneponto. Dengan dukungan penuh dari pemerintah daerah Jeneponto, masyarakat memetakan status ekonomi dan sosial mereka sendiri dalam sebuah sistem informasi geografis yang sekarang digunakan sebagai basis untuk semua program pengentasan kemiskinan di kabupaten itu.



Paling atas: Layanan pemerintah dirampingkan, membuat masyarakat Aceh bisa mendapatkan berbagai layanan dari satu tempat, secara cepat, murah dan transparan. Foto: AusAID.

Diatas: Seorang wanita memberikan suaranya untuk kepala desanya dalam sebuah pemilihan kepala daerah di Aceh. Foto: AusAID

Keamanan dan perdamaian

Garis Besar

Bencana mempengaruhi negara-negara miskin di dunia semakin sulit, tidak terkecuali Indonesia. Profil iklim, geografis dan seismik, dikombinasikan dengan populasi 220 juta orang, berarti ribuan orang berada dalam keadaan yang rentan ketika bencana menghantam.

Membantu Indonesia ketika membutuhkan adalah landasan bagi Kemitraan Australia Indonesia, yang dibuktikan oleh respon yang cepat segera setelah tsunami terjadi sehari setelah natal 2004 dan gempa bumi Yogyakarta pada bulan Mei 2006. Namun demikian, kemitraan tersebut lebih dari sekedar untuk memastikan bahwa respon itu efektif. Ini adalah soal tugas penting untuk membantu masyarakat, dan pemerintah serta kelompok masyarakat sipil yang melayaninya, yang harus dipersiapkan dan tahan terhadap berbagai bencana yang terjadi di masa yang akan datang.

Australia juga memberikan sumbangan bagi pemeliharaan perdamaian dan stabilitas di Aceh menyusul berhentinya konflik yang sudah berlangsung selama 30 tahun, termasuk dengan membantu para mantan pejuang untuk membangun kehidupan yang baru.

Siap bencana menyelamatkan jiwa

Membangun kemampuan pemerintah untuk tanggap bencana

Pemerintah Indonesia berada di garis depan ketika bencana melanda, karena itu sangat penting bagi badan-badan manajemen bencana tingkat nasional dan provinsinya untuk dengan cepat dan efektif merespon bencana-bencana tersebut. Sebuah proyek senilai \$1,4 juta untuk membangun kemampuan Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana (BAKORNAS BNPB), dan membangun hubungan dengan *Emergency Management Australia*, selesai pada bulan Oktober 2007.

Selama tahun tersebut BAKORNAS BNPB direstrukturisasi dan panduan penanganan bencana dirancang. BAKORNAS BANPB dan *Emergency Management Australia* membangun hubungan yang lebih kuat dan para pejabat senior Indonesia melakukan studi banding ke Australia untuk meningkatkan pengetahuan mereka tentang penanganan bencana, koordinasi bencana, asuransi dan pendanaan bantuan. Metode untuk membentuk Tim Cepat Tanggap, yang siap untuk sebuah bencana, juga dibentuk.

Memperkuat kesiapan dan ketahanan masyarakat

Ketika bencana menimpa, masyarakat sering kali tidak siap dan tidak yakin bagaimana meresponnya dan hal ini dapat menimbulkan dampak yang lebih parah. Untuk meningkatkan kesadaran dan kesiapan masyarakat, AusAID bekerjasama dengan

organisasi-organisasi berbasis masyarakat dan LSM, termasuk dua organisasi muslim terbesar di Indonesia, yakni Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.

Di antara mereka, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah memiliki lebih dari 90 juta anggota, yang sebagian besar berada di pedesaan. AusAID telah mendanai organisasi-organisasi ini untuk meningkatkan kesadaran bencana melalui sekolah-sekolah yang mereka miliki, terutama propinsi-propinsi yang beresiko tinggi, seperti Sumatra Barat, Bengkulu, Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jakarta. Para murid dan guru, serta kelompok-kelompok mudah Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, saat ini menyuarkan kesiapan menghadapi bencana dalam masyarakat mereka.

Program senilai \$700.000 dengan Nahdlatul Ulama selesai pada bulan Oktober 2007 dan fase kedua untuk kurun waktu dua tahun, sedang dikembangkan. Program senilai \$1,27 juta dengan Muhammadiyah juga akan dilanjutkan pada pertengahan 2008.

Di Aceh, Australia membantu lebih dari 200 penduduk untuk mengidentifikasi rute-rute penyelamatan dan mempersiapkan rencana tanggap darurat, yang sangat penting untuk menyelamatkan jiwa di wilayah yang secara geologis tidak stabil ini.

Kesiapan Masyarakat Kepulauan Mentawai dan Nias

Kepulauan Mentawai dan Nias adalah daerah terpencil yang rawan terhadap aktivitas seismik. Program kesiapan darurat senilai \$3,15 juta, yang dikelola oleh *SurfAID International*, terus bekerja dengan masyarakat yang terisolasi di 55 desa pantai, agar mereka dapat mengidentifikasi, mempersiapkan dan merespon bencana. Setelah dapat mengidentifikasi bencana gempa bumi dan tsunami sebagai bencana utama, masyarakat setempat juga prihatin dengan masalah banjir, tanah longsor, air pasang, badai tropis, siklon dan kebakaran hutan.

‘Mengapa kita merasa lebih aman? Karena sekarang kita punya masyarakat yang tahu apa yang harus dilakukan dan jika ada sesuatu yang kita takutkan seperti tsunami atau gempa bumi, kita dapat bekerjasama sebagai sebuah tim.’

Bapak Budi, Kepala Desa, Silabu Barat, Kepulauan Mentawai



Diatas dan kiri: Murid-murid sekolah di Pulau Nias melakukan latihan evakuasi untuk menyiapkan mereka apabila terjadi gempa. Kesiapan bencana mengurangi resiko luka dan kematian. Foto: Mark Travers, AusAID



Australia memberi dukungan kepada masyarakat Yogyakarta setelah angin besar menumbangkan pohon-pohon dan rumah-rumah Februari 2007.
Foto: Dian Lestariningsih

Keberhasilan program tersebut terlihat ketika gempa bumi yang sangat kuat menghantam Sumatra Bagian Barat pada bulan September 2007. Banyak desa yang terkena bencana dengan percaya diri dan cepat mempraktekkan pelatihan yang telah mereka terima, sehingga jumlah korban yang jatuh hanya sedikit.

Program kesiapan di Yogyakarta-Jawa Tengah

Sejak gempa yang mengguncang Yogyakarta, sementara rekonstruksi terus berjalan, aktifitas kesiapan bencana berbasis masyarakat membantu lebih dari 5000 orang untuk memiliki persiapan yang lebih baik jika bencana lainnya datang menghantam.

Kelompok dan rencana penanggulangan bencana lokal dibentuk pada 2007, dengan mendorong kerja sama dan independensi dalam menangani bencana. Hal ini akan membantu masyarakat untuk memobilisasi dirinya sendiri selama bencana dan memiliki ketahanan diri.

Program pelatihan mengajarkan berbagai teknik seperti menyelamatkan diri, latihan evakuasi dan membangun tempat tinggal sementara yang aman dan tahan air. Para guru juga dilatih dan meneruskan pengetahuannya pada rekan sekerja dan murid-muridnya.

AusAID lebih siap diri

Selama 2007, AusAID meningkatkan kemampuannya untuk tanggap pada keadaan darurat. Tim Cepat Tanggap menerima berbagai pelatihan, peralatan untuk bergerak ditingkatkan, dan persiapan dimulai dengan membuat gudang untuk menyimpan peralatan gawat darurat dan pasokan di Jakarta, yang akan dibuka pada 2008. Kesepakatan tetap dengan mitra-mitra tanggap darurat yang penting juga dipertahankan.

Membantu Indonesia ketika terjadi bencana

Indonesia mengalami beberapa bencana skala kecil hingga sedang pada 2007 dan Pemerintah Australia memberikan bantuan darurat ketika diperlukan setelah berkonsultasi dengan Pemerintah Indonesia.

Australia juga bekerja erat dengan Palang Merah Indonesia, Federasi Internasional Palang Merah dan Masyarakat Bulan Sabit, dan Perwakilan Perserikatan Bangsa-bangsa untuk Urusan Kemanusiaan (UNOCHA) untuk menilai dan menanggapi keadaan darurat. Australia menyediakan pendanaan inti untuk UNOCHA untuk mempertahankan kehadiran mereka di Indonesia.

Berbagai respon terhadap bencana harus tepat waktu dan dipertimbangkan dalam hal skala, kemampuan masyarakat lokal dan pemerintah daerah untuk memberikan respon, melihat kesenjangan dalam bantuan dan daerah dimana dampak yang paling signifikan dapat dicapai.

Ketika Jakarta dan daerah sekitarnya tersapu banjir pada bulan February 2007, Australia menyumbangkan \$250.000 melalui Palang Merah dan Program Pangan Dunia untuk memberikan makanan dan berbagai pasokan untuk keadaan darurat.

Angin puting beliung dengan kecepatan 70 kilometer per jam menghantam Yogyakarta pada bulan yang sama dan menghancurkan lebih dari 1.000 rumah. Sebagai tanggapan, Australia menyediakan \$30.000 untuk menyediakan air minum bersih dan pasokan lainnya, dan untuk mendukung dapur umum yang melayani lebih dari 8.000 paket makanan setiap harinya.

Pada bulan April, Menteri Lingkungan Hidup Indonesia meminta bantuan Australia untuk merespon lumpur yang menyembur dari rekahan dekat lokasi pengeboran di Sidoarjo, Jawa Timur. Lumpur tersebut mengakibatkan lebih dari 12.000 rumah, lusinan pabrik dan sawah, serta lebih dari 40.000 warga diungsikan. Australia menyediakan \$90.000 untuk proyek *United Nations Environment Program* (UNEP) untuk mencari pemecahan masalah yang dari segi lingkungan dan perekonomian memungkinkan untuk menanggulangi dan membuang lumpur tersebut.

Pada bulan September, gempa bumi berkekuatan 8.4 skala Richter mengguncang Propinsi Bengkulu dan Padang, yang mengakibatkan penderitaan bagi lebih dari 27.000 penduduk. Australia menyumbangkan \$50.000 melalui Palang Merah dan kemudian \$150.000 melalui SurfAID untuk membantu masyarakat membangun kembali kehidupan mereka.

Australia mendanai UNICEF dan World Food Programme untuk bekerja bersama dengan pemerintah Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat untuk menanggulangi rawan pangan dan gizi buruk, terutama pada anak-anak usia 13 tahun dan para perempuan hamil dan sedang menyusui. Program tersebut telah meningkatkan status gizi dari kelompok-kelompok ini dan memperkuat sistem pemerintah dalam hal ketahanan dan respon keamanan pangan.

Pada bulan Juli, AusAID menyediakan dukungan ketika belalang menghancurkan pertanian di Nusa Tenggara Timur. AusAID memberikan \$700.000 kepada Organisasi

Pangan dan Pertanian (FAO) untuk menyediakan peralatan pengendali lahan dan pelatihan bagi daerah-daerah yang paling parah, dan bekerja bersama Pemerintah Indonesia untuk memperkenalkan bio pestisida yang aman dan memungkinkan untuk penyemprotan kembali di Indonesia.

Program untuk membantu korban bom Kedutaan Australia di Jakarta (2004) selesai pada 2007, meskipun dukungan kesehatan dan pendidikan terus berlangsung.

Perdamaian di Aceh

Kehancuran yang diderita Aceh setelah tsunami sering kali mengecilkan dampak dari konflik yang telah berlangsung selama 30 tahun yang terjadi sebelum tsunami. Sebelum tsunami, Aceh adalah propinsi termiskin keempat di Indonesia sebagian karena kerusakan ekonomi dan sosial sebagai akibat dari konflik kekerasan tersebut.

Proses perdamaian berlangsung pada 2007, dengan dibuatnya Nota Kesepahaman yang ditandatangani pada bulan Agustus 2005 antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Para mantan pejuang kembali menyatu dengan masyarakat—yang paling terkenal, seorang mantan petinggi GAM saat ini menjadi Gubernur Aceh.

Namun demikian, kesulitan tetap ada, tujuh dari 10 mantan pejuang menjadi pengangguran. Pekerjaan AusAID di sektor budi daya air—industri utama di daerah tersebut sebelum tsunami—membantu banyak orang untuk memiliki alternatif mata pencaharian, yang turut mendukung upaya-upaya perdamaian dan stabilitas dalam jangka panjang di Aceh.

Keuntungan dari perdamaian

Setelah konflik bersenjata selama 30 tahun di Aceh berakhir dan perdamaian dipulihkan, Ismail Muhammad bingung kehidupan apa yang harus ia jalani. Mantan komandan GAM tersebut kini cemas mengenai mata pencahariannya.

Sebelum konflik terjadi ia adalah petani udang di desa Samuti Krueng, tapi usahanya tersebut terhenti, sebagaimana yang dialami oleh banyak warga lainnya di Aceh dimana udang telah menjadi pegangan hidup—sebagai sumber makanan, sebagai lapangan pekerjaan dan sebagai komoditas yang menguntungkan.

Kehidupan Ismail menjadi lebih baik ketika ia bertemu dengan para pakar produksi udang dari International Finance Corporation yang, dengan pendanaan AusAID, memberikan penyuluhan tentang bagaimana ia harus mengelola tambaknya dan memperoleh keuntungan yang lebih besar untuk usahanya tersebut.

Setelah melepaskan 300.000 benih udang di tambaknya, Ismail mulai melakukan budi daya. Pada panen pertamanya ia memperoleh 415 kilogram udang besar yang dijual dengan harga Rp 19 juta (sekitar \$2.250). Keuntungan bersih

Rp 14 juta—13 juta lebih banyak dibandingkan dengan pendapatan bulanan rata-rata penduduk Indonesia.

